



PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

LKj Pejabat

triwulan 2

TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIBUNAL II TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas **Sekretaris** terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja **Tahun 2023** ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja **Sekretaris**.

Sekretaris merupakan salah satu bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan **Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian, dan pengembangan. Sedangkan Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, **Sekretaris** mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pada Badan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- h. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa;
- i. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada **Tahun 2023**.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana **Perjanjian Kinerja Tahun 2023** yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sekretaris yang menyatakan menjanjikan akan melaksanakan **1 (satu) Sasaran** dan **7 (tujuh) Indikator Kinerja** dan **1 (satu) program** dengan **7 (tujuh) kegiatan** dengan uraian, sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100%
		Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100%
		Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	100%
		Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100%
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.114.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.106.512.005
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.777.500
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.241.103
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	433.133.000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.391.065
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.052.600
	Jumlah	4.938.221.273

2.2 CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun **2023 TRI BULAN II** :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja **TRI BULAN II** Sekretariat Bappeda **2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi %	Capaian %	Ket.
1	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 %	45,45	4,54	-
		Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	74,19	0,74	-
		Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian PD	100 %	96,49	0,96	-
		Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	100 %	53,33	0,53	-
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	55,56	0,55	-
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	17,86	0,17	-
		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	0	0	-

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023, jumlah alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang khususnya di lingkup Sekretariat dengan pagu anggaran **Rp 4.938.221.273** dengan realisasi sebesar **Rp 1.901.751.004** atau sebesar **38,51 %** secara detail penyerapan anggaran tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut :

2.2 . Cost per outcome Sekretaris Bappeda Tri Bulan II Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	4.938.221.273	1.901.751.004	38,51	100	77	7,7	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	23.114.000	5.052.100	21,85	100	45,45	4,54	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi keuangan perangkat daerah	3.106.512.005	1.442.334.429	46,42	100	74,19	0,74	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi kepegawaian PD	71.777.500	37.051.200	51,61	100	96,49	0,96	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja	472.241.103	172.995.529	36,63	100	53,33	0,53	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	433.133.000	208.930.150	48,23	100	55,56	0,55	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	439.391.065	35.397.596	9,02	100	17,86	0,17	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	392.052.600	0	0	100	0	0	-

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan penunjang
urusan pemerintah daerah

Dalam rangka mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebuah organisasi melalui Sekretariat Bappeda dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan terhadap capaian atas target kinerja, telah **mencapai** angka 100 % sesuai realisasi anggaran di Sekretariat.

Langkah-langkah yang diupayakan dalam mewujudkan keberhasilan yang dilakukan adalah secara intens melakukan **koordinasi** kepada Subag Kepegawaian dan Pejabat Fungsional juga pejabat pelaksana di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Sub Bagian dalam rangka mencapai target realisasasi yang harus sesuai dengan time schedule yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran, agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan serta melakukan monitoring sebagai upaya perbaikan perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Mendorong Kasubag. umum dan kepegawaian dan pejabat fungsional serta pejabat pelaksana di Sekretariat untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan 100 % sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari **1 program** dengan **7 (tujuh) kegiatan** yang ditetapkan, **1 (satu) sasaran** dan 7 (tujuh) indikator kinerja, dimana target tersebut 77 % **berhasil diwujudkan** dengan optimal.
3. Hal – hal yang mendukung keberhasilan yaitu ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang ada telah melakukan kegiatan yang sama / rutin setiap tahunnya.

LEMBAR PENGESAHAN

Lumajang, 05 Juli 2023

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP. 19670325 199312 2 001

SEKRETARIS BAPPEDA

PUGUH BUDI LASWONO, S.T., M.T.
NIP. 19780508 200903 1 005

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada triwulan pertama ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2013 dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan, dan perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan terkait kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;

- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai peran penting dalam penyusunan rencana program, administrasi kepegawaian, pengelolaan pengadaan, dan inventarisasi barang, urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan dan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

TABEL 2.1
Tabel Capaian Kinerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terealisasinya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	3 dokumen
2	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54 orang
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket
5	Terselenggaranya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket
6	Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi	3 laporan
8	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	1 laporan
9	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan
10	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	4 laporan

		disediakan	
11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	24 unit
		Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang direhabilitasi	3 unit
		Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	1 unit

Tabel 2.2
Cost Per Outcome Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan 2 Tahun 2023

No	Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (9 –6) (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terealisasinya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	2.000.000	.0	41,15	3 dokumen	1 dokumen	0,3	
2	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	69.777.500	36.208.200	51,89	54 orang	54 orang	1	
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2.135.000	343.500	16,09	4 paket	2 paket	0,5	
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	61.592.953	52.746.700	85,64	5 paket	2 paket	0,25	
5	Terselenggaranya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	42.676.150	27.953.250	65,50	3 paket	2 paket	0,6	
6	Terselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi	365.837.000	91.952.079	25,13	3 laporan	2 laporan	0,6	
7	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	9.285.000	4.078.104	43,92	1 laporan	1 laporan	1	
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	150.272.000	72.430.255	48,20	4 laporan	2 laporan	0,5	

9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	273.576.000	132.421.791	48,40	4 laporan	2 laporan	0,5	
10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	110.702.600	28.199.596	25,47	24 unit	3 unit	12,5	
11	Terpeliharanya peralatan mesin lainnya	Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang direhabilitasi	81.350.000	7.198.000	2,95	3 unit	2 unit	0,6	
12	Tersedianya gedung dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	200.000.000	0	0	1 unit	0 unit	0	

2.2 CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023 :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terealisasinya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	3 dokumen	1 dokumen	0,3
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54 orang	54 orang	1
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2 paket	0,5
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	2 paket	0,25
Terseleenggaranya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	2 paket	0,6
Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi	3 laporan	2 laporan	0,6
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	2 laporan	0,5
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	4 laporan	2 laporan	0,5

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	disediakan			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	24 unit	3 unit	12,5
Terpeliharanya peralatan mesin lainnya	Jumlah jenis prasarana gedung kantor/bangunan lain yang direhabilitasi	3 unit	2 unit	0,6
Tersedianya gedung dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	1 unit	0 unit	0

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi Sub Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang telah terlaksana dengan baik di tribulan II Tahun 2023.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Bidang dalam rangka Pencapai target Realisasi harus sesuai dengan Time Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar penyerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IV sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk Evaluasi atas Implementasi LKj OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 108 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 12 target sasaran sub kegiatan yang ditetapkan, berhasil diwujudkan dengan optimal.

Lumajang, 05 Juli 2023

Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA



PUGUH BUDI LASWONO, S.T., M.T.
NIP. 19780508 200903 1 005

KEPALA SUB. BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN



HARDINA MEIDIASTUTI, SE.
NIP. 19790526 201101 2 005

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan ke II (dua) Tahun 2023 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun kekurangoptimalan pencapaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda melaksanakan penyusunan kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan terbagi menjadi 4 (empat) kelompok sub substansi, yaitu :

1. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
2. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
4. Kelompok Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana kerja badan;
- c. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bappeda dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja
Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Termanfaatkannya kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan	100%
2	Termanfaatkannya kajian bidang sosial dan kependudukan	Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan	100%
3	Termanfaatkannya kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	100%
4	Terfasilitasinya kegiatan inovasi dan teknologi	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi	100%

	Kegiatan	Anggaran
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 1.013.363.950
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Rp 200.000.000
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp 178.591.000
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 526.007.360
	Jumlah	Rp 1.917.962.310

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan serta target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2023.

Tabel 2
Rencana Capaian Kinerja Tribulan II Tahun 2023
Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	Termanfaatkannya kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan	100%	0	0%	
2	Termanfaatkannya kajian bidang sosial dan kependudukan	Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	100%	0	0%	
3	Termanfaatkannya Kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan	100%	0	0%	
4	Terfasilitasinya kegiatan inovasi dan teknologi	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi	100%	20%	20%	

Tabel 3
Realisasi Program Kegiatan
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tribulan ke II Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efisiensi (Rp.)	Capaian	Ket
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.013.363.950	7.500.000	1.005.863.950	0,75 %	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	200.000.000	0	0	0%	
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	178.591.000	0	0	0%	
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	526.007.360	41.274.500	484.732.860	7,75%	
	Jumlah	1.917.962.310	48.774.500	1.869.187.810	4,5 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Pada tahun 2023 akan dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kajian penelitian, dengan rencana metode pemilihan pihak ketiga yaitu melalui pengadaan langsung dan swakelola tipe II. Proses pengadaan jasa konsultasi melalui pengadaan langsung untuk penyusunan kajian belum dilaksanakan.

Rangkaian kegiatan Lumajang Innovation Award (LIA) 2023 sudah dilaksanakan, di mulai dengan sosialisasi, pendaftaran, seleksi dan kunjungan lapangan. Rangkaian kegiatan tersebut akan berakhir di bulan Juli saat penyerahan penghargaan LIA tanggal 21 Juli 2023. Secara penganggaran fasilitasi kegiatan Innotek Award Provinsi Jawa Timur juga sudah dilaksanakan dengan mendampingi inovator yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti presentasi di kantor BRIDA Jawa Timur tanggal 20-21 Juni 2023, yaitu Inovasi Menabung Kopi dan Dalam Tegalan. Sosialisasi fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pemenang LIA 2023 sudah dilaksanakan dan akan ada bantuan pembiayaan untuk pendaftarannya.

Kajian bidang perekonomian pertanian yaitu kajian pupuk alternatif bekerjasama dengan LP2M Universitas Jember sudah melakukan *Forum Grup Discussion* (FGD) laporan pendahuluan dan saat ini dalam tahap pengumpulan data di lapangan. Sedangkan kajian lain yang bekerjasama dengan Universitas Airlangga (UNAIR) dan dengan konsultan pihak ke 3 masih pada tahap koordinasi dan diharapkan pada tribulan ke III bisa di terbitkan SPMK nya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga dan perguruan tinggi, akan terus di dilakukan koordinasi agar sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-
-
-
-

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai *time schedule*;
2. Pencapaian sasaran pada sub bidang pada Tribulan ke II sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, tapi realisasi anggaran masih belum sesuai dengan sesuai *time schedule* karena beberapa kegiatan melibatkan instansi vertical.

Lumajang, 05 Juli 2023

Mengetahui,
Kepala Bappeda
Kabupaten Lumajang

Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP 19670325 199312 2 001



dr. IMANNURDIN ABDILLAH, M.Kes
NIP 19811021 201001 1 013

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan II Tahun 2023 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga/Provinsi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- g. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri 3 sub substansi, antara lain :

- a. Sub Substansi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Sub Substansi Pembangunan Manusia;
- c. Sub Substansi Pemerintahan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdapat target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu :

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SASARAN/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	95%

	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	1.361.157.239
	Jumlah Total	Rp	1.361.157.239

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023.

Tabel 2.1. Realisasi Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tribulan II Tahun 2023

NO	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	95%	43%	45%

2.2. Cost per outcome Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Tri Bulan II Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisien
			Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD	1.361.157.239	231.419.922	17	95%	43%	45%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten terkait peningkatan IPM telah dilaksanakan dengan baik, koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Provinsi juga telah dilaksanakan dengan baik. Terkait penyusunan kajian yang ada di bidang PPM telah dilaksanakan koordinasi dengan pihak penyusun agar selesai tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Program kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tribulan II tahun 2023 dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 17,00% anggaran terserap dari total anggaran sebesar Rp. 1.361.157.239,-, sedangkan kinerja sebesar 43% dari target kinerja 95%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 45%

Daftar Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tri Bulan II adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	677.008.361	132.308.922	19,54%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.412.000	2.025.000	9,04%

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.150.000	-	0,00%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.331.628	47.041.500	15,41%
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.380.000	9.169.000	42,89%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	57.452.500	2.150.000	3,74%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	255.422.750	38.725.500	15,16%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Fungsi dan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perencanaan dan koordinasi harus lebih ditingkatkan agar perencanaan yang telah dibuat dapat tepat sasaran/efektif sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa mendukung fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia secara maksimal.

Selain itu, kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan secara swakelola, perlu didorong untuk dilakukan penyelesaian secara administrasi keuangan. Sehingga target kinerja kegiatan dan target kinerja keuangan akan selesai tepat pada waktunya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tri Bulan II Tahun 2023 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah dilaksanakan dengan baik sampai dengan tribulan II tahun 2023.
2. Pencapaian sasaran keuangan dan kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah cukup baik. Untuk capaian penyerapan keuangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 17% dari total anggaran sebesar Rp. 1.361.157.239,-, dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 45% yang didukung dengan capaian kinerja dari total 7 Sub kegiatan.
3. Beberapa rencana aksi pada sub-sub kegiatan belum dilaksanakan karena masih pada tahap tribulan II dan akan dilaksanakan pada tribulan berikutnya.

Lumajang, 05 Juli 2023

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP. 19670325 199312 2 001

KABID PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA



FAHRIZAL MUTTAQIEN A., ST.
NIP. 19850331 200903 1 004

**LAPORAN KINERJA
BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja **Tahun 2023** ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja **Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan** yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang **Nomor 15 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang **Nomor 108 Tahun 2021, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi pariwisata, penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, badan usaha milik daerah, lingkungan hidup, kebencanaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan;

- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga/Provinsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kerja sama antar daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; 10
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan adalah dengan mewujudkan 1 (satu) Target Kinerja, 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis yaitu terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA.

Tabel .1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	90 %
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	90 %

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	219.994.000,-
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	334.991.500,-
	Jumlah Total	554.985.500,-

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan sampai dengan **Tribulan II Tahun 2023** :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sampai dengan Tribulan II Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	90 %	35,41 %	39,34 %
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	90 %	38,54 %	42,82 %

Tabel 2.2

Cost per outcome Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Tri Bulan II, Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			P	R	C (%)	T	R	%	
1	Terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan PD	219.994.000	44.104.000	20,05 %	90%	35,41 %	39,34 %	19,25 %
2	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Persentase dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan PD	334.991.500	94.227.000	28,13 %	90%	38,54 %	42,82 %	14,67 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan Tabel diatas, untuk capaian kinerja pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di TW II Tahun 2023 untuk bidang infrastruktur dan kewilayahan adalah 39,34 % dengan capaian anggaran sebesar 20,05 % dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 19,25 %. Sedangkan keterserapan anggaran Berdasarkan tabel di atas untuk Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar Rp. 44.104.000,- dari total anggaran Rp. 219.994.000,-. Untuk Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan di TW II Tahun 2023, berdasarkan tabel, capaian kinerja bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah 42,82 % dengan capaian anggaran sebesar 28,13 % dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 14,67 % dan untuk realisasi anggaran berdasarkan tabel yang telah direalisasi sebesar Rp. 94.227.000,- dari total anggaran Rp. 334.991.500,-.

Berdasarkan data di atas untuk tingkat efisiensi tergolong dalam batas efisien (Batasan efisien secara anggaran adalah kurang dari -20 % sampai dengan 20%).

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dari realisasi capaian kinerja dan capaian anggaran pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sampai dengan TW II Tahun 2023 beberapa kegiatan telah dilaksanakan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan secara terus menerus dan berkelanjutan akan tetap memfasilitasi dan mendukung terwujudnya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 Program dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan, capaian anggaran mencapai 20,05 % untuk sasaran Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan capaian kinerja sebesar 39,34 % serta capaian anggaran sebesar 28,13 % untuk sasaran Terwujudnya Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA dengan capaian kinerja sebesar 42,82 %.

Lumajang, 05 Juli 2023

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA

Kepala Bidang
Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP 19670325 199312 2 001



VENDY PRAYASDIKA WIDHARMA, ST., MT.
NIP 19860620 200903 1 002

**LAPORAN KINERJA PEJABAT
BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan bidang dengan tujuan agar masing-masing unit OPD dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada dibawah pengawasannya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah disepakati.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2023 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah;
- pelaksanaan analisis serta pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan ke depan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Data dan Evaluasi terdiri 3 sub bidang, antara lain :

- a. Sub Bidang Data dan Informasi;**
- b. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;**
- c. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.**

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi dengan Sub Bidang Data dan Informasi, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan serta Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan dengan terdapat target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu:

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Tahapan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%
2	Terfasilitasinya tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%
3	Terfasilitasinya Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	100%

KEGIATAN		ANGGARAN	
1	Perencanaan dan Pendanaan	Rp	1.134.341.528
2	Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	87.190.000
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	374.617.500
	Jumlah	Rp	1.596.149.028

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, serta target kinerja yang harus dicapai pada TriBulan II tahun 2023.

Tabel 2
Realisasi Program Kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Sampai TriBulan II Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terfasilitasinya Tahapan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	90,71%	69,28,%	76,38%
2	Terfasilitasinya tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	45,00%	30,00%	66,67%
3	Terfasilitasinya Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi	67,33%	60.50%	89,85%

1.2. Cost per outcome BidangPerencanaan Pengendalian dan Evaluasi TriBulan II, Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA			EFISIENSI
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian	
1	Perencanaan dan Pendanaan	1.134.341.528	328.540.000	28,96	90,71%	69,28,%	76,38%	
2	Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	87.190.000	15.300.000	17,55	45,00%	30,00%	66,67%	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	374.617.500	143.617.500	38,34	67,33%	60.50%	89,85%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Data dan Evaluasi Bappeda sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, sedangkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.

Adanya adanya regulasi baru menyebabkan pelaksanaan program kegiatan serta aktifitas kinerja perencanaan menjadi terganggu karena menunggu penyesuaian regulasi dan pengesahaan dari perubahan tersebut sehingga jadwal pelaksanaan aktifitas kegiatan menjadi molor.

Terkait kegiatan, sampai pada tribulan ke II tahun 2023, capaian target kinerja keuangan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam time schedule kegiatan. Hal dapat dilihat dari penyelesaian kegiatan-kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi secara fisik sudah dalam tahap penyelesaian/penyempurnaan. Diharapkan kinerja keuangan akan dapat segera terealisasi sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Pencapaian tribulan 2 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tribulan 3 agar bisa berjalan lebih baik lagi dan sesuai target, baik secara kinerja maupun target keuangan. Untuk target pada tribulan II yang belum tercapai akan dilaksanakan dan dikejar pada tribulan 3 secara simultan sehingga upaya tersebut diharapkan mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaannya

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi telah di laksanakan dengan baik;
2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi belum sesuai dengan yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja demikian juga target kinerja keuangan belum sesuai target karena ada beberapa kelengkapan administrasi yang perlu dipenuhi. Dalam tahun 2023 ke depan akan dilakukan upaya-upaya koordinasi yang lebih baik lagi agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik.
3. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang belum tercapai akan dilaksanakan pada tribulan 3

Lumajang, 05 Juli 2023

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001

KABID DATA DAN EVALUASI
BAPPEDA KAB. LUMAJANG


SYAIFUDDIN ZUHRI
NIP. 197200107 199803 1 006